

**DAMPAK DARI PEMEKARAN PROVINSI PAPUA SELATAN, PROVINSI
PAPUA PEGUNUNGAN, PROVINSI PAPUA TENGAH TERHADAP
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG OTONOMI
KHUSUS PAPUA**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Ilmu
Hukum (M.IH) pada Program studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh

JESSIE HEMBRING

2002190087



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Jessie Hembring
NIM : 2002190087
Program Studi : Hukum Program Magister
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "DAMPAK DARI PEMEKARAN PROVINSI PAPUA SELATAN, PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN, PROVINSI PAPUA TENGAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2021 TENTANG OTONOMI KHUSUS PAPUA" adalah :

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, buku-buku dan jurnal acuan di dalam referensi pada tesis saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah diduplikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Magister di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalua terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas ini dianggap batal.

Jakarta, 13 Februari 2023



Jessie Hembring



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Oleh

Nama Mahasiswa : Jessie Hembring
Nomor Induk Mahasiswa : 2002190087
Program Studi : Magister Hukum
Judul Skripsi : Dampak Dari Pemekaran Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 13 februariv2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.
NIP / NIDN : 191690 / 8807033420

Pembimbing II

Dr. Fernando Silalahi., S.T., S.H., M.H., C.L.A
NIP / NIDN : 191643 / 0322117104

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H
NIDN / NIDK : 141104 / 032 7096 504

Direktur

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA
NIDN / NIDK : 001473/0320116402



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

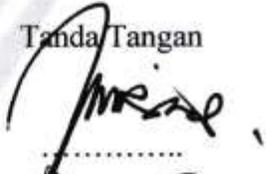
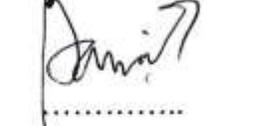
Pada tanggal 24 Januari 2023 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagai persyaratan akademi guna memperoleh gelas Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama Mahasiswa : Jessie Hembring
Nomor Induk Mahasiswa : 2002190087
Program Studi : Hukum Program Magister
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul

**DAMPAK DARI PEMEKARAN PROVINSI PAPUA SELATAN, PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN, PROVINSI PAPUA TENGAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 2
TAHUN 2021 TENTANG OTONOMI KHUSUS PAPUA”**

Oleh tim penguji yang terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.	Sebagai Ketua	
2. Dr. Fernando Silalahi., S.T., S.H., M.H., C.L.A	Sebagai Anggota	
3. Dr. Fauzan, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 13 Februari 2023



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jessie Hembring
NIM : 2002190087
Fakultas : Program Pascasarjana
Program Studi : Magister Hukum
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Dampak Dari Pemekaran Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah Terhadap Undang-Undang No 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 24 Januari 2023



Jessie Hembring
2002190087

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas karunia dan penyertaanNya penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul, *“Dampak Dari Pemekaran Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua.”* Penelitian ini diwujudkan untuk memenuhi untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (M.IH) pada program studi magister ilmu hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia. Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan maupun dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ijinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Dhaniswara K. Hardjono, S.H.,M.B.A. Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia
3. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Universitas Kristen Indonesia
4. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S. Selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberi waktu, arahan, nasehat, dan dukungan dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini.

5. Dr. Fernando Silalahi., S.T., S.H., M.H., C.L.A Selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberi waktu, arahan, nasehat, dan dukungan dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini.
6. Dr. Fauzan, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji dalam tesis ini yang selalu memberi waktu, arahan, nasehat, dan dukungan dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Internasional yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. dan seluruh staf Magister Hukum, Universitas Kristen Indonesia yang ikut serta membantu memberikan dukungan dan bantuan dalam menulis tesis ini.
8. Keluarga tercinta, Alm. Papa-Obeth Hembring, Alm. Mama-Esther Yambe Yabdi, dan saudara/i terkasih Kaka Ira. W Hembring, Obeth Nego Hembring, Jefri Hembring, Meyzina. H Iwong, Febiola Hembring, Margaretha H, Ronaldo F Talakua, Joy Yambeyabdi, Martinus Yambeyabdi, Ribka Yambeyabdi, Heni Novalisa Tabisu, Aleandro Kevin Boekorsjom yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, semangat dan motivasi hingga menjadikan penulis dapat melalui proses selama mempersiapkan dan menyelesaikan penulisan teisi ini.
9. Orang tua tercinta Yusuf Yambeyabdi dan Deby M Yambeyabdi yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, doa dan motivasi yang kuat hingga penulis dapat melalui proses selama mempersiapkan dan menyelesaikan penulisan teisi ini.

10. Mama Tersayang Ludia D. Felle Yambeyabdi yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, doa dan motivasi yang kuat hingga penulis dapat melalui proses selama mempersiapkan dan menyelesaikan penulisan teisi ini.

11. Mama Terkasih Yugiantie Solaiman yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyelesaikan perkuliahan dan penulisan teisi ini melalui beasiswa, motivasi dan doa.

12. Keluarga besar Jesus For You (J4U) Ministry yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, doa dan motivasi yang kuat hingga penulis dapat melalui proses selama mempersiapkan dan menyelesaikan penulisan teisi ini.

Semoga Tuhan Yesus akan membalas segala bantuan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang membangun yang dapat menyempurnakan penelitian ini. Semoga tulisan ini memberikan sumbangsih yang berarti untuk pihak-pihak yang membutuhkan.

Jakarta, 13 Februari 2023

Jessie Hembring

2002190087

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	19
1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian	19
1.4. Metode Penelitian Hukum.....	20
1.5. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
2.1. Kerangka Teoritis dan Konseptual	26
2.1.1. Teori Hukum Murni.	26
2.1.2. Teori <i>Trias Politica</i> (Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan).....	33
2.1.3. Konsep Desentralisasi dan Otonomi	39
BAB III DAMPAK PEMEKARAN PROVINSI PAPUA SELATAN, PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN, PROVINSI PAPUA TENGAH TERHADAP UU OTSUS NO.2.....	46
TAHUN 2021 DAN DESENTRALISASI ASIMETRIS DI PAPUA..	46
3.1. Esensi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua bagi Masyarakat Lokal di Papua.....	46
3.2. Implikasi Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021 Terhadap Pemekaran Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah.	52

3.2.1. Implikasi Sosial dan Politik.....	59
3.2.2. Implikasi Pembangunan dan Sosial-Ekonomi.....	65
3.2.3. Implikasi Pada dimensi pelayanan publik	78
3.2.4. Implikasi Pertahanan dan Keamanan	87
3.2.5 Implikasi Sosial dan Budaya . Error! Bookmark not defined.	
3.3. Dampak Pemekaran dari Provinsi Papua terhadap Desentralisasi Asimetris	102
BAB IV PERANAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI DAMPAK PEMEKARAN DI PROVINSI PAPUA SELATAN, PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN, PROVINSI PAPUA TENGAH TERHADAP UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS NO 2 TAHUN 2021	113
4.1. Eksistensi UU Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Papua Terhadap Orang Asli Papua (OAP).....	113
4.1.1. Dana Otonomi Khusus	115
4.1.2. Kelembagaan	118
4.1.3. Bidang Sosial.....	123
4.1.4. Bidang Pertanian.....	129
4.1.5. Hak Asasi Manusia (HAM).....	132
4.2 Desentralisasi Asimetris di Papua	140
BAB V PENUTUP	146
5.1. Kesimpulan.....	146
5.2. Saran	147
DAFTAR PUSTAKA	149

ABSTRAK

Praktik desentralisasi asimetris dirubah melalui regulasi UU Otsus Papua yang baru secara yuridis, bahwa UU Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua UU Otonomi Khusus Papua, pemekaran Provinsi Papua tidak hanya mengakomodir konsep *bottom up*, tetapi juga *top down*. Konsep *top down* adalah inisiatif murni yang datang dari pemerintah dan DPR. Hal merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Orang Asli Papua (OAP) secara desentralisasi asimetris di Indonesia berdasarkan UU Otsus Papua. Studi ini bertujuan untuk menganalisis Dampak Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Papua (Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan) terhadap desentralisasi asimetris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus di Papua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran DOB di Papua memiliki motif politik yaitu, motif insentif materiil dan motif insentif idealism. Hal ini, sangat berimplikasi pada sosial, politik, ekonomi, pembangunan, keamanan, pertahanan dan budaya Papua. perlunya pembenahan dan sinkronisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua, dengan melibatkan MRP sebagai representasi kultural Orang Asli Papua (OAP) sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 dan 2 UU Otsus Papua.

Kata Kunci : Daerah Otonomi Baru, Desentralisasi Asimetris, Regulasi Undang-Undang Otsus

ABSTRACT

The practice of asymmetric decentralization has been changed through the regulation of the new Papua Special Autonomy Law legally, that Law Number 22 of 2021 concerning the Second Amendment to the Papua Special Autonomy Law, the division of the Papua Province not only accommodates the bottom up concept, but also top down. The top down concept is a pure initiative that comes from the government and the DPR. This is a form of violation of the Human Rights (HAM) of Indigenous Papuans (OAP) in an asymmetrical decentralized manner in Indonesia based on the Papua Special Autonomy Law. This study aims to analyze the impact of the expansion of the New Autonomous Region in Papua (South Papua, Central Papua and Highlands Papua) on the asymmetric decentralization in Law Number 2 of 2021 concerning Special Autonomy in Papua. The method used in this research is normative legal research and qualitative analysis techniques. The results of this study indicate that the new autonomous regions expansion policy in Papua has political motives, namely, material incentive motives and idealism incentive motives. This has serious implications for the social, political, economic, development, security, defense and culture of Papua. the need for reform and synchronization of Law Number 2 of 2021 concerning Special Autonomy for Papua, by involving the MRP as a cultural representation of Indigenous Papuans (OAP) according to their duties and functions based on Article 5 Paragraphs 1 and 2 of the Papua Special Autonomy Law.

Key Words : New Autonomous Region, Asymmetrical Decentralization, Regulation of the Special Autonomy Law